

**ANALISIS FIQH SIYÂSAH TERHADAP STRATEGI KOMISI
PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA GOLONGAN PUTIH
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Sya'riah

Oleh:

M. RAUSYAN FIKRI

NPM 1621020236

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS FIQH SIYÂSAH TERHADAP STRATEGI KOMISI
PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA GOLONGAN PUTIH
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

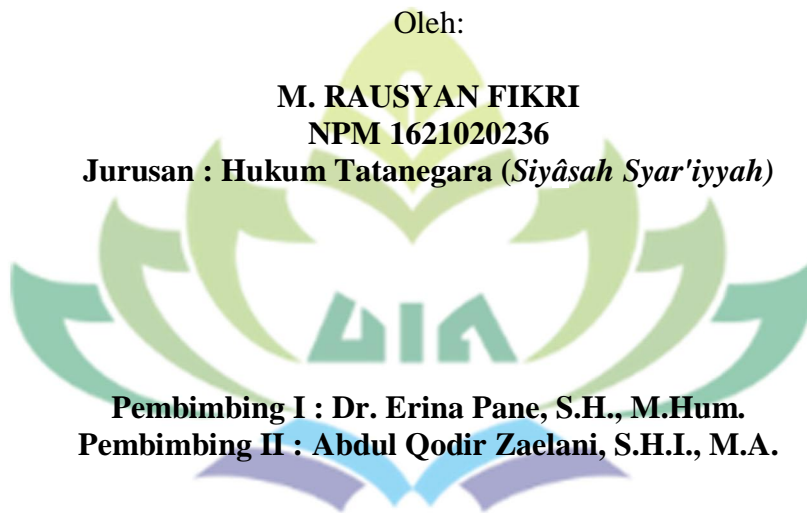
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Sya'riah

Oleh:

M. RAUSYAN FIKRI

NPM 1621020236

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyâsah Syar'iyah*)



Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Golput menjadi sebuah fenomena yang selalu saja hadir dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Golput sendiri merupakan istilah politik yang digunakan untuk menyebut para pemilih yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Pilihan golput ini diambil sebagai bentuk bukti kekecewaan masyarakat terhadap kinerja politisi terutama para anggota legislatif. Meningkatnya angka golput dalam setiap penyelenggaraan pemilu tentu menjadi sebuah masalah yang harus segera mendapatkan respon dari pihak penyelenggaraan yang dalam hal ini adalah KPU. Hal ini juga yang kemudian mendasari adanya fatwa MUI mengenai haramnya perilaku golput. Melihat realita ini, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai analisis fiqh siyasah terhadap strategi Komisi Pemilihan Umum dalam menekan angka golput dalam pemilu legislatif tahun 2019 (studi di KPU Kota Bandar Lampung).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput dalam pemilu legislatif Tahun 2019? dan Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilu legislatif Tahun 2019 dalam perspektif *fiqh siyâsah*? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilu legislatif tahun 2019, dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyâsah* terhadap strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilu legislatif tahun 2019 di kota Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode *field research* (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber data diperoleh dari hasil wawancara sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari membaca referensi dari buku-buku yang terkait dengan masalah peran komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Menekan Golput pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 terdiri dari strategi penguatan, strategi rasionalitas, strategi bujukan dan strategi konfrontasi. Tinjauan fiqh siyasah terhadap strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam menekan golput pada pemilu legislatif Tahun 2019 masuk ke dalam cakupan *siyâsah dustûriyyah* sebab KPU merupakan lembaga negara yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang disebabkan karena adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, Terkait dengan perilaku golput, dalam pandangan *fiqh siyâsah* perilaku golput dalam pemilu hukumnya adalah haram karena Islam secara tegas telah mewajibkan umat manusia untuk memilih pemimpin. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59, Hadis Rasuallah SAW yang diriwayatkan oleh riwayat Abu Dawud, serta *Ijtima'* Ulama MUI yang diselenggarakan di Padang Panjang tanggal 23-26 Mei 2009.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

Pernyataan Orisinalitas

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rausyan Fikri

NPM : 1621020236

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syar'iyah*)

Fakultas : *Syari'ah*

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyâsah terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golongan Putih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil orisinal penulis, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali diakui dengan referensi yang dibuat dalam teks. Jika kemudian hari terbukti bukan hasil karya sendiri maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



M. Rausyan Fikri

NPM. 1621020236



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama:

Nama : M. Rausyan Fikri

NPM : 1621020236

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyâsah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyâsah terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golongan Putih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A.

NIP. 197005022000032001

NIP. 198206262009011015

Mengetahui
Ketua Jurusan

Frengki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Leikol H. Endro Suratmin, Sukaramé, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyâsah Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)” Disusun oleh: **M. Rausyan Fikri, NPM: 1621020236, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyâsah Syar’iyyah)**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah Pada hari , 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua

: Dr. H. Jayusman, M.Ag.

(.....)

Sekretaris

: Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

(.....)

Penguji Utama

: Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

(.....)

Pembimbing I

: Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.

(.....)

Pembimbing II

: Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

(.....)

Dekan



Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS An-Nisa: 59)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pertama kali untuk Abi Nazmi Rusyad, Ibunda Sudarsih serta Nenekku, yang bagaimana mereka adalah ladang pahala saya, dan selalu mengarahkan saya untuk kembali ke jalan benar apabila terkadang saya tersesat, tidak ada yang mampu membalas semua jasa kalian Abi, Ibu, dan Nenek. Mungkin skripsi ini memang bukan hal yang wah untuk saya banggakan dihadapan kalian, tetapi skripsi ini sebagai tanda bahwa saya menjaga amanah selama jauh dari kalian, terimakasih Abi, Ibu, dan Nenek. Kepada saudara sedarahku yaitu Rizkiya Nada Ramadhani yang di mana beliau adalah Ayuk yang selalu mensupport masalah pendanaan, dan untuk Adindaku M.Aqil Zuhdi selaku Adik yang terkadang menyebalkan, tetapi pada dasarnya nurut. Untuk yang keempat ini saya ucapkan terimakasih kepada Sulistiawati Anggi Mawarni, yang di mana royal kontribusinya dalam membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan sudah memakan waktu pribadinya. Kepada rekan-rekanku Andre Anastino, Alvin Amyus, Alex Hermawan Saputra, Ahmad Zikrullah, Aditiya Dimas Priadi, S.E., Wido Zuwika, S.H. yang selalu membuat hari-hari penuh alasan untuk kembali lagi. Kepada rekan-rekan seperjuangan rusunawaku yaitu Tommy Yahya, Julio Syahrezi, Fikri Romadhon, M. Irvan Rapido dan Ariyansyah selaku pengukir sejarahku selama menjadi mahasiswa. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah M. Rausyan Fikri, penulis dilahirkan di Lampung Utara, Kotabumi pada tanggal 23 Juli 1998, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Nazmi Rusyad dan Ibu Sudarsih.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Aisyah Aba II pada tahun 2004, setelah itu penulis melanjutkan studi di SDN 02 Kotabumi Tengah yang diselesaikan pada tahun 2010 kemudian melanjutkan studi di SMPN 10 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2013 dan melanjutkan studi di SMAN 01 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada 2016 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Hukum Tata Negara (*Siyâsh Syar'iyah*)

Penulis adalah anak yang sangat ekstra dalam mendapatkan perhatian orang tua, penulis adalah anak yang hyper aktif dan suka sekali dengan hal-hal yang dilarang orang tuanya, ya dialah M. Rausyan Fikri dan masih banyak hal-hal menarik tentang dirinya yang tidak bisa disebutkan, terimakasih.

Bandar Lampung, 12 Mei 2020

M. Rausyan Fikri

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

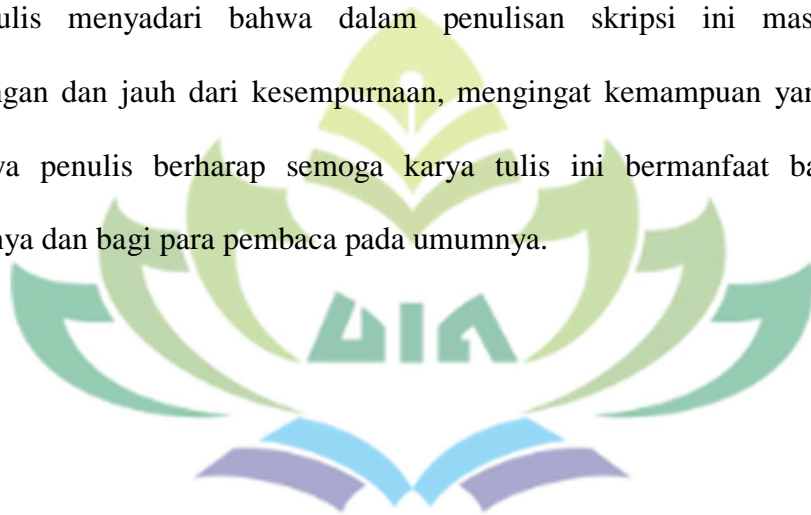
Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tak lupa dihaturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Fiqh Siyâsah Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)".

Adapun maksud dari skripsi ini adalah sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Tatanegara (*Siyâsah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung.

4. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu dibangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater UIN Raden Intan Lampung tecinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



DAFTAR ISI

Halaman

COVER JUDUL LUAR.....	i
COVER JUDUL DALAM.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikasi Penelitian	10
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori	
1. Tinjauan <i>Siyâsah Syar'iyah</i>	
a. Pengertian <i>Siyâsah Syar'iyah</i>	19
b. Pengertian <i>Fiqh Siyâsah</i>	20
c. Cakupan <i>Fiqh Siyâsah</i>	21
2. Tinjauan Tentang Pemilu	
a. Pengertian Pemilu	23
b. Sistem Pemilu.....	25
c. Pengertian Pemilu Legislatif Daerah	25
d. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu Legislatif	26
3. Tinjauan Tentang Golput	
a. Tinjauan Perilaku Tidak Memilih (Golput)	28
b. Kategori dan Implikasi Golput.....	31
c. Bentuk Perilaku Golput.....	35
d. Faktor-Faktor Penyebab Golput.....	38
4. Golput dalam Konsep <i>Fiqh Siyâsah</i>	42
5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Golput	50

B. Tinjauan Pustaka	54
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek	
1. Profil KPU Kota Bandar Lampung	56
2. Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung	56
3. Kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung	58
4. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Sekretaris Kota Bandar Lampung	58
5. Anggota Komisioner KPU Kota Bandar Lampung	66
B. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019	70
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Menekan Golput pada Pemilu Legislatif Tahun 2019	84
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Menekan Golput pada Pemilu Legislatif Tahun 2019	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Rekomendasi	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif Secara Langsung.	6
2. Informan Penelitian.....	13
3. Data Jumlah Pemilih Kota Bandar Lampung tahun 2019.....	71
4. Dapil Anggota DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2019.....	72
5. Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2019	72
6. Hasil Pemilu Legislatif DPR Provinsi Kota Bandar Lampung tahun 2019.....	73
7. Hasil Pemilu Legislatif DPD Kota Bandar Lampung tahun 2019	74
8. Hasil Pemilu Legislatif DPR Pusat Kota Bandar Lampung tahun 2019.....	75



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Meminimalisir Golput ... 83



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul: "Analisis *Fiqh Siyâsah* terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golongan Putih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)". Maka penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Analisis *Fiqh Siyâsah*

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹
- b. *Fiqh Siyâsah* yaitu usaha sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum hukum *syâra* sehingga dapat di amalkan oleh umat Islam,² untuk mengatur, mrngurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³

¹Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Media English Press, 1999), h. 61.

²Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Semarang : CV Diponegoro, 2001), h. 6.

³Ibnu Mazhur, *Lisan al-'Arab, Jus 6* (Beirut : Dar al-Shadr, 1968), h.108.

2. Strategi Komisi Pemilihan Umum

- a. Strategi adalah cara mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, ia merupakan sebuah rencana untuk sebuah kegiatan di mana di dalamnya termasuk formulasi tujuan dan rencana kegiatan.⁴
 - b. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.⁵
3. Golongan putih (golput) atau perilaku tidak memilih diartikan sebagai bentuk keengganan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif, pemilihan umum kepala daerah dan juga pilpres, perilaku ini muncul sebagai ekspresi rasa kecewa terhadap sistem politik dan pemilihan umum yang tidak mampu memberikan perubahan apapun dalam kehidupan masyarakat.⁶
4. Pemilihan umum legislatif merupakan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota legislatif, pemilihan umum legislatif dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu penguraian mengenai strategi KPU Kota Bandar

⁴Mangkuprawira, Tb. Sjafri, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), h. 14.

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta ; CV Gramedia Pustaka, 2005), h. 356.

⁶Priyatmoko, dkk, *Sikap Politik dan Afiliasi Orang Tua dan Perilaku Memilih Pemuda Kota Surabaya* (Surabaya : Lembaga Penelitian UNAIR, 1992), h. 2.

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 243.

Lampung dalam upaya menekan perilaku tidak memilih (golput) pada saat pelaksanaan pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 di Kota Bandar Lampung dalam tinjauan *fiqh siyâsah*.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang mendorong penulis menulis skripsi dengan judul "Analisis *Fiqh Siyâsah* terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golongan Putih pada Pemilihan umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)" adalah:

1. Alasan Objektif

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2019 ini, tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri khususnya bagi KPU Kota Bandar Lampung selaku institusi yang memegang kendali dalam pelaksanaan pemilihan umum untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih sekaligus juga menekan angka golput di tengah krisis kepercayaan masyarakat kepada sistem demokrasi dan para wakil rakyat. Angka partisipasi pemilih di Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di tahun 2019 masih belum optimal dan memenuhi target pemerintah pusat yakni hanya mencapai sebesar 77% dengan angka golput masih mencapai 23%, dimana target partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh KPU yakni sebesar 77,5% (angka golput 22,5%).

2. Alasan Subjektif

Penelitian ini sesuai dengan latar belakang atau relevansi keilmuan yang penulis tekuni, yaitu Jurusan *Siyâsah* dalam lingkungan Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya literatur baik primer maupun sekunder dan data penelitian lapangan yang menunjang dalam penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dimana kekuasaan tertinggi berasal rakyat, secara jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Implementasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat ini kemudian diwujudkan dalam pemilihan umum atau pemilihan umum.

Pemilihan umum diartikan sebagai proses pemungutan suara di mana semua warga Negara yang memiliki hak pilih dapat menyalurkan hak pilihnya atau dipilih sebagai pemimpin. Pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan merupakan sarana untuk memilih kepala daerah, wakil rakyat dan presiden secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Pemilihan umum diselenggarakan sebagai upaya membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Pemilihan umum legislatif memiliki arti penting dalam penyelenggaraan demokrasi sebab rakyat yang telah memiliki hak pilih diberikan kesempatan langsung untuk dapat mengirimkan wakil-wakil yang

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 763.

sesuai dengan pilihan mereka yang tentunya diharapkan memiliki kualitas dan mampu mewakili keinginan dan mengedepankan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu maka pelaksanaan pemilihan umum legislatif di tahun 2019 ini diharapkan mampu menjadi sebuah momentum perubahan untuk mencapai sistem demokrasi yang lebih baik terutama dari segi proses, prosedur, dan kualitas, sehingga akan terwujud pemilihan umum yang lebih baik, optimal penyelenggaraannya dan berkualitas.

Indikator kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya terkait dengan optimalnya kinerja teknis penyelenggaraannya saja, namun salah satu indikator yang bisa diukur untuk menilai kesuksesan sebuah penyelenggaran pesta demokrasi adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum.⁹ Kemunculan kelompok masyarakat yang menamai diri sebagai Golput (Golongan Putih) merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa trend partisipasi masyarakat mulai menurun, seiring dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat yang ternyata tidak mampu memberikan dampak perubahan apapun.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) melalui hasil survei mencatat bahwa trend golput mengalami peningkatan dan penurunan, pada penyelenggaraan pemilihan umum legislatif pertama secara langsung yakni tahun 2004 jumlah golput sebanyak 15,9%, pada pemilihan umum tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 29,1%, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan

⁹[Jazulijuwainima.blogspot.com/2013/07/menuju-pemilihan umum-berkualitas.html](http://Jazulijuwainima.blogspot.com/2013/07/menuju-pemilihan-umum-berkualitas.html).
(Diakses pada 5 September 2019 pukul 22.27 WIB).

sebanyak 4% yakni angka golput masih mencapai 24,8%, agar lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1
Tingkat Golput dalam Pemilihan umum Legislatif Secara Langsung

No	Tahun Penyelenggaraan	Persentase Golput
1.	2004	15,9%
2.	2009	29,1%
3.	2014	24,8%
4.	2019	23,00%

Sumber: (<http://m.merdeka.com/politik/tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilihan-umum-1955-2014.html>, diakses pada 5 September 2019, pukul 22.50 WIB).

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Kabupaten/Kota dan sekaligus ibu kota dari Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Kota Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk.¹⁰ Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung merupakan daerah dengan jumlah DPT terbanyak nomor 3 di Provinsi Lampung yakni dengan jumlah DPT sebanyak 639.174 pemilih..

Pemilihan umum legislatif tahun 2014 mencatat bahwa angka partisipasi pemilih di Kota Bandar Lampung sebesar 487.355 pemilih dari total 653.730 suara DPT, artinya jika dipresentasikan maka tingkat partisipasi pemilih di Kota Bandar Lampung sebesar 75,2%, dan angka golput atau pemilih yang tidak memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum legislatif Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 166.375 pemilih. Jadi angka

¹⁰<http://bps.go.id/kependudukan/kota-terpadat-di-sumatera>, (diakses pada 5 September 2019, pukul 23.13 WIB.)

golput pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Bandar Lampung berjumlah 24,8%.¹¹

Pada tahun 2014 juga terlihat bahwa angka partisipasi politik masyarakat mengalami peningkatan namun jumlahnya tidak signifikan dan hanya sebesar 4,3%. Meskipun pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2019 persentase angka golput mencapai 23,00% atau naik 0,2% namun jumlah kenaikan ini tidaklah signifikan.¹² Sebab bisa dilihat dalam kurun waktu lima tahun angka golput hanya turun sebesar 0,2%.

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa kinerja KPU Kota Bandar Lampung dinilai masih belum efektif dalam mengentaskan permasalahan golput. Berdasarkan data tersebut, penulis menilai bahwa efektivitas kinerja KPU Bandar Lampung dalam menangani permasalahan golput masih jauh dari kata berhasil. Terlebih lagi adanya penetapan tingkat target partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU Republik Indonesia yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebesar 77,5%.

Masih belum tercapainya target tingkat partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU RI di Kota Bandar Lampung menjadi *early warning* bahwa permasalahan seputar *voter turnout* bisa menjadi ancaman bagi demokrasi di Kota Bandar Lampung. KPU Kota Bandar Lampung memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menekan angka golput KPU Kota Bandar

¹¹Sumber : Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilihan umum Legislatif 2014 Kota Bandar Lampung (tersedia di <http://kpubandarlampungkota.go.id/berita/hasil-rekapitulasi-pemilihan-umum-legislatif-tahun-2014>, diakses pada 5 September 2019 pukul 00.01 WIB).

¹²*Ibid.*

Lampung memiliki tugas dalam meningkatkan partisipasi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sebah hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam mencapai penyelenggaraan pemilihan umum yang sukses. Oleh sebab itu maka KPU Kota Bandar Lampung harus memiliki strategi yang tepat untuk menekan angka golput yang pada akhirnya akan berimbas pada peningkatan partisipasi pemilih.

Strategi tersebut dapat berupa sosialisasi atau juga pendidikan politik kepada masyarakat selaku pemilih. Penerapan strategi yang tepat harus benar-benar diupayakan oleh KPU agar masyarakat khususnya para pemilih dapat mengetahui secara jelas mengenai pemilihan umum. Selain petunjuk teknis pemilih juga harus diberikan pengertian tidak hanya mengenai cara memberikan hak suara atas keinginan sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain namun juga mengenai pentingnya memberikan suara yang akan berdampak kepada masa depan bangsa. Dengan hal ini diharapkan para pemilih akan sadar dan tidak hanya dijadikan sebagai alat pemenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul "*Analisis Fiqh Siyâsah* terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golongan Putih pada Pemilihan umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)".

D. Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat terfokus kepada fokus penelitian yang akan dijalankan.

Sehingga peneliti akan lebih mudah dan fokus dengan penelitian yang akan dijalankan yaitu mengenai "Analisis *Fiqh Siyâsah* terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)".

Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menjabarkan mengenai bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan umum legislatif tahun 2019, dan melihat analisis *fiqh siyâsah* terhadap strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kota Bandar Lampung secara lebih mendalam lagi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan umum legislatif tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyâsah* terhadap strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan umum legislatif tahun 2019.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyâsah* terhadap strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kota Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar dapat menekan angka golput khususnya di Kota Bandar Lampung yang setiap tahun penyelenggaraan pemilihan umum selalu mengalami peningkatan dan mampu memberikan analisis yang mendalam terhadap strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstibusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya kepada pihak KPU Kota Bandar

Lampung untuk menerapkan strategi yang tepat dalam menekan angka golput. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian sejenis khususnya yang berkaitan dengan analisis *fiqh siyâsah* terhadap strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tatanegara khususnya di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh dalam lingkungan sosial, serta dapat memperkuat eksistensi KPU Kota Bandar Lampung di masyarakat luas, dalam memberikan informasi tambahan serta pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan strategi yang tepat untuk menekan angka golput pada penyelenggaraan pemilihan umum di masa yang akan datang.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan.¹³ Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, artinya data yang dikumpulkan bukan

¹³Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2006), h. 118.

berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.¹⁴ Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap. Pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena.¹⁵ Peneliti ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput di Kota Bandar Lampung.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pengambilan data dari tempat yang menjadi subyek penelitian langsung yaitu kantor KPU Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bagaimana strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput di Kota Bandar Lampung.

¹⁴Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, h. 10.

¹⁵*Ibid.*

3. Partisipan dan Lokasi Penelitian

a. Partisipan

Partisipan yang dimaksud adalah sejumlah informan yang mendukung dalam penelitian ini. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap layak dan representatif dalam memberikan informasi dan fakta. Kriteria yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagian dari KPU Kota Bandar Lampung periode 2014-2019.
- 2) Terlibat dalam penetapan strategi KPU Kota Bandar Lampung periode 2014-2019.
- 3) Terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2019.
- 4) Mengetahui banyak informasi terkait pemilihan umum legislatif tahun 2019.

Berdasarkan kriteria tersebut penulis melihat beberapa pihak yang relevan dan dapat dijadikan informan serta memiliki kesesuaian dengan kriteria-kriteria penetapan sampel penelitian sebagaimana dijabarkan di atas, adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Kode Informan
1.	Dedy Triyadi, S.E., S.H.	Ketua KPU	I ₁

2.	Tuyono, S.Sos.	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	I ₂
3.	Badarudin Amir, S.H.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	I ₃
4.	Risma Mauli AZ, S.E., M.IP	Kasubbag Program dan Data	I ₄

b. Lokasi Penelitian

KPU Kota Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Pulau Sebesi No. 90 Sukarame Kota Bandar Lampung dipilih sebagai Lokasi penelitian dikarenakan berdasarkan kepada permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang penelitian, yaitu masih tingginya angka golput pada pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya, kurangnya sosialisasi dari KPU Kota Bandar Lampung dalam upaya menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi pemilih, serta sosialisasi yang masih belum tepat sasaran.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁶ Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.¹⁷

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan menggunakan metode pengumpulan data dan

¹⁶Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, h. 195.

¹⁷E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI,1983), h. 29.

orisinal.¹⁸ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang terkait Lampung termasuk juga hasil wawancara dengan informan mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan umum legislatif tahun 2019.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya). Data sekunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) dengan cara dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.¹⁹ Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalh, jurnal, artikel serta bahan media online yang terkait dengan pokok permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara / *Interview*

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

¹⁸Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Bagaimana Menulis Dan Meneliti* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 148.

¹⁹Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 147.

permasalahan yang harus diteliti.²⁰ Wawancara ialah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, antara peneliti dengan sumber data maupun pihak KPU Kota Bandar Lampung sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini merupakan metode pelengkap untuk membuktikan data yang diperoleh melalui observasi mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan umum legislatif tahun 2019.

Sumber data wawancara diperoleh dari narasumber yang akan diwawancara adalah sebanyak 4 informan yakni Fauzi Heri, S.T. selaku ketua KPU Kota Bandar Lampung, Tuyono, S.Sos. yang menjabat sebagai kasubbag umum, keuangan dan logistik, Badarudin Amir, S.H. selaku kasubbag teknis dan hupmas dan Suprihatin selaku Kasubbag Program dan Data.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap

²⁰*Ibid.*

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²¹

Metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan menghimpun data mengenai hal yang berkaitan dengan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan umum legislatif tahun 2019, melalui catatan-catatan serta dokumen yang disusun. Termasuk juga laporan mengenai angka golput pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif periode sebelumnya.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap di atas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:²²

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.

²¹Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian*, h. 148.

²²Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian*, h. 243.

7. Teknik Analisis Masalah

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain., sehingga dapat mudah dipahami.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para narasumber atau informan,²⁴ dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁵ Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.²⁶

Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁷ Dalam mengolah hasil data penulis menggunakan metode pendekatan secara induktif yakni berangkat dari fakta-fakta secara umum untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara khusus, selanjutnya penulis akan membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir.

²³Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta : Rhineka Cipta, 2011), h.104.

²⁴Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, h. 105..

²⁵Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bandung, 2004), Cet.I, h.127.

²⁶Susiadi , AS., *Metode Penelitian* (Bandar Lampung : LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 106.

²⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Nirmatif* (Malang : Bayumedya Publishing , 2006), h. 295.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan *Siyâsah Syâr'iiyyâh*

a. Pengertian *Siyâsah Syâr'iiyyâh*

Secara sederhana *siyâsah syar'iiyyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyâsah syar'iiyyah* dengan: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman tāj yang merumuskan *siyâsah syar'iiyyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunah.²⁸

Dengan menganalisis definisi-definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *siyâsah syar'iiyyah*, yaitu:

- 1) Bahwa *siyâsah syar'iiyyah* berhubungan dengan pengurusan dan

²⁸Abdurrahman, *Al-siyâsah al-Syâr'iiyyâh wa al-Fiqh al-Islamin* (Mesir: Mathba'ah Dar al Ta'lif, 1993), h. 10.

pengaturan kehidupan manusia.

- 2) Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu âi-amr*).
- 3) Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.²⁹

Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Berdasarkan hakikat *siyâsah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyâsah syar'iyah* adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah.³⁰ Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

b. Pengertian *Fiqh Siyâsah*

Istilah *fiqh siyâsah* merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyâsah*. Secara etimologis, *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Sementara mengenai asal kata *siyâsah* terdapat dua pendapat.³¹

Definisi *fiqh* dan *siyâsah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan definisi *fiqh siyâsah*.

²⁹Abdurrahman, *Al-siyâsah al-Syār'iyāh wa al-Fiqh al-Islamin*. h. 11.

³⁰*Ibid*.

³¹*Ibid*, h. 12.

Penting dicatat, di kalangan teoritisi politik Islam, ilmu *fiqh Siyâsah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyâsah syar'iyah*.³² Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyâsah* adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.

c. Cakupan *Fiqh Siyâsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyâsah*, diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyâsah* mencakup:

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyâsah dustûriyyah*)
- 2) Ekonomi dan militer (*siyâsah mâliyyah*).
- 3) Peradilan (*siyâsah qadhâ'iyah*).
- 4) Hukum perang (*siyâsah harbiyyah*).

³²Abdurrahman, *Al-siyâsah al-Syâr'iyâh wa al-Fiqh al-Islamin*, h. 13-14.

5) Administrasi negara (*siyâsah idâriyah*).³³

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.³⁴ Sementara Abdul wahhab khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³⁵

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyâsah* menjadi delapan bidang yaitu politik pembuatan perundang-undangan, politik hukum, politik peradilan, politik moneter/ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksanaan perundang-undangan dan politik peperangan.³⁶

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyâsah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama politik perundang-undangan (*alsiyâsah al- dustûriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyrî'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhâ'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idâriyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*al-siyâsah al-kharijîâh*). Bagian ini

³³Al-Mawardi, *Al-Ahkâm As-Sulthāniyah*, M Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), h. 4.

³⁴Muhammad Amin, *Ijihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam* Jilid IX (Jakarta: INIS, 1991), h 15.

³⁵Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 9.

³⁶T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah* (Yogyakarta : Madah, 2000), h. 70.

mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-siyâsah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*al-siyâsah al-maliyâh*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyâsah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Dengan *siyâsah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat, baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan. Secara terperinci Imam al-Mawardi menyebutkan di antara yang termasuk ke dalam hukum kekuasaan atau kewenangan *siyâsah syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang.

Dikutip oleh A.Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan *siyâsah syar'iyah* itu ke pada delapan bidang, yaitu: *siyâsah dustûriyyah syar'iyah*, *siyâsah mâliyyah syar'iyah*, *siyâsah qadhâ'iyah syar'iyah*, *siyâsah harbiyyah syar'iyah*, *siyâsah idâriyyah syar'iyah*, *siyâsah tasyrî'iyâh syar'iyah*, *siyâsah dauliyâh syar'iyah*, *siyâsah tanfiziyâh syar'iyah*.

2. Tinjauan Tentang Pemilu

a. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas

atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.³⁷ Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³⁸

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.³⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

³⁷ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu* (Jakarta: Prisma Media 2004), h. 29.

³⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³⁹ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, h. 30.

b. Sistem Pemilu

Pemilihan umum sebagai lambang dan sekaligus tolak ukur dari demokrasi yang dianut dan dilaksanakan suatu bangsa/negara, hal ini merupakan gambaran sistem politik yang digunakan. dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- 1) *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan atau wilayah distrik memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
- 2) *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).⁴⁰

c. Pengertian Pemilu Legislatif Daerah

Dalam ranah ilmu politik, Pemilihan Umum (pemilu) adalah cara yang sah untuk berebut kekuasaan politik. Pemilu merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Berdasarkan konstitusi Indonesia bahwa pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan pemilu adalah:

- 1) Memilih wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat baik tingkat pusat, wilayah maupun daerah (DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).
- 2) Memilih wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan daerah.

⁴⁰Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), h. 461.

- 3) Membentuk pemerintahan yang demo-kratis, kuat serta memperoleh dukungan sebesar-besarnya dari rakyat (*Legitimate*).⁴¹

Keanggotaan Lembaga Perwakilan yang dipilih melalui pemilu, maka sifat perwaki-lannya disebut perwakilan politik (*Political Representation*). Hal ini merupakan per-wujudan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁴²

d. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu Legislatif

Adapun dasar hukum pelaksanaan pemilu legislatif adalah berdasarkan UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan hrjuan nasional sebagaimana termaktu-b dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwqludan kedaulatan ralgrat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang-

⁴¹Deni Nudyanan Hedimin “Analisis Kebijakan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Daerah Yang Ideal Dalam Membangun Pemerintahan Daerah Yang Lebih Demokratis “, *Jurnal UNIKOM*, Vol. 13 No. 1 (Desember 2015).

⁴²Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan Umum. Serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah] dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun penyelenggara kegiatan pemilu ini dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.⁴³ Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.⁴⁴

Pelaksanaan dan tahapan pemilu legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-undang adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali
- 2) Tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi:
 - a) Pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
 - b) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
 - c) Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
 - d) Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.
 - e) Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - f) Masa kampanye pemilu.

⁴³Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6.

⁴⁴*Ibid*, Pasal 3.

- g) Masa tenang.
- h) Pemungutan dan perhitungan suara.
- i) Penetapan hasil pemilu, dan
- j) Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.⁴⁵

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.⁴⁶ Sedangkan sistem pemilihan untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.⁴⁷ Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik.⁴⁸ Sedangkan peserta untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.⁴⁹

3. Tinjauan Tentang Golput

a. Tinjauan Perilaku Tidak Memilih (Golput)

Konsep perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung, tetapi ada sebuah pandangan lain yang berseberangan dan bertolak belakang dengan konsep perilaku pemilih. Konsep tersebut adalah perilaku tidak memilih atau yang lebih dikenal dengan sebutan golongan putih (golput). Golput sesungguhnya merupakan fenomena politik dalam sebuah negara demokrasi. Pelaku

⁴⁵Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 4 ayat 1.

⁴⁶*Ibid*, Pasal 5 ayat 1.

⁴⁷*Ibid*, Pasal 5 ayat 2.

⁴⁸*Ibid*, Pasal 7.

⁴⁹*Ibid*, Pasal 11.

golput memiliki tujuan mendelegitimasi pemilihan umum yang diselenggarakan pemerintah. Sisi lain yang membuktikannya adalah pemerintah yang telah memberikan ruang aspirasi bagi kepentingan kelompok ekstra parlemen. Kenyataan itu menyebabkan golput sering disebut juga sebagai barometer kualitas demokrasi.

Golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilihan umum.⁵⁰ Beberapa ahli berpandangan bahwa warga yang berhalangan hadir di tempat pemilihan suara (TPS) karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau luput dari pendaftaran, otomatis tidak termasuk kategori golput. Pandangan tersebut diperkuat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Asfar dalam Efriza yang mengatakan bahwa:

Batasan perilaku nonvoting tidak berlaku bagi para pemilih yang tidak memilih karena faktor kelalaian atau situasi-situasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemilih, seperti karena sakit atau kondisi cuaca termasuk sedang berada di suatu wilayah tertentu seperti tempat terpencil atau ditengah hutan yang tidak memungkinkan untuk memilih. Dalam konteks semacam ini, nonvoting adalah suatu sikap politik yang tidak menggunakan hak pilih pada saat hari H Pemilihan umum karena faktor tidak adanya motivasi.⁵¹

⁵⁰Prihatmoko, J. Joko, *Pemilihan umum 2004 dan Monsolidasi Demokrasi* (Semarang: LP2I, 2003), h. 150.

⁵¹Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Jakarta: Alfabeta, 2012), h. 534.

Golput sebagai kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan. Sejak awal ada sekelompok orang yang tidak mau didaftarkan sebagai pemilih sehingga tahapan pemilihan umum tidak diikutinya. Selain itu ada juga sekelompok orang yang terdaftar sebagai pemilih, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.⁵²

Susan Welch dalam Efriza menyatakan ketidakhadiran seseorang dalam pemilihan umum berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan pemilih.⁵³ Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilihan umum tentu ia akan tidak hadir ke bilik suara, begitu pula sebaliknya. Di samping itu, ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi. Kalau seseorang merasa lebih beruntung secara finansial dengan tidak hadir dalam pemilihan umum, tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.

Arief Budiman dalam Joko Prihatmoko mengatakan bahwa golput bukan organisasi, tanpa pengurus, dan hanya merupakan pertemuan solidaritas.⁵⁴ Golput adalah sebuah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan dan aturan main demokrasi yang diinjak-injak oleh partai politik dan pemerintah demi memenangkan pemilihan umum dengan menggunakan aparat negara melalui cara di luar batas aturan main demokratis. Keberadaan golput

⁵²Pahmi Sy, *Politik Pencitraan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 60.

⁵³Efriza, , *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, h. 535 .

⁵⁴Prihatmoko, J. Joko, *Pemilihan Umum 2004 dan Monsolidasi Demokrasi*, h. 151.

mengindikasikan bahwa proses politik yang sedang berlangsung tidak benar. Kendati tidak memiliki kekuatan politik, golput melakukan gerakannya dengan diamtungkan.

Berdasarkan penjelasan dan pendapat mengenai golput dari para ahli di atas, golput dapat diartikan sebagai suatu gerakan sekelompok orang (masyarakat) atau individu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sekelompok orang atau individu tersebut memiliki alasan yang sengaja untuk tidak memilih serta memiliki tujuan yang jelas mengenai hal yang dilakukannya tersebut dan juga dengan dampak atau akibat yang akan terjadi nantinya. Golput juga sebagai wujud protes politik dikarenakan adanya perasaan yang tidak puas dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh sistem dan objek politik yang ada disekitarnya.

b. Kategori dan Implikasi Golput

Golongan putih (golput) merupakan bentuk protes masyarakat karena ketidakpuasan maupun ketidakpercayaan terhadap kekuatan politik yang dikuasai oleh seseorang atau sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Gerakan protes tersebut biasanya bersifat teknis mengacu kepada pelaksanaan demokrasi. Sikap golput lebih dianggap sebagai bentuk perlawanan atas parpol dan para kandidat yang tidak sesuai dengan aspirasi, sedangkan di sisi kandidat, golput akan melemahkan legitimasi mereka.⁵⁵

⁵⁵Efriza, , *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. h. 541.

Ketidakpuasan dan ketidakpercayaan tersebut hanya sebagian alasan yang melandasi pilihan untuk menjadi golput. Menurut Eep Saefullah dalam Efriza fenomena golput terpilah ke dalam tiga kategori besar, antara lain:

1) Golput Teknis


Golput teknis ini dijelaskan ke dalam beberapa kelompok seperti di bawah ini:

- a) Pemilih yang berhalangan hadir karena ketiduran seusai bergadang semalaman sehingga kehilangan kesempatan mencoblos. Selain itu absen di tempat pemungutan suara karena kelelahan, sakit atau harus mengurus jenazah dan memakamkan kerabatnya.
- b) Pemilik suara tidak sah karena keliru mencoblos akibat gagalnya sosialisasi atau minimnya pengetahuan pemilih.
- c) Pemilih yang kurang pengetahuan misalnya di pelosok daerah. Mereka yang tak tahu untuk apa pemilihan umum diadakan dan untuk apa mereka memilih, kaitan pilihan dan kepentingan, bahkan tak tahu apa yang ia inginkan sehingga gamang dan tak mencoblos.
- d) Pemilik suara tidak dapat memilih karena tidak mendapat undangan dan tidak terdaftar sebagai pemilih (tidak masuk dalam daftar pemilih tetap) atau disengaja tidak diberikan

undangan oleh pihak panitia walaupun sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.⁵⁶

2) Golput Politis

Golput politis ini terdiri atas beberapa kelompok, antara lain:

- a) Pemilih tidak memiliki pilihan dari salah satu kandidat karena tidak sesuai dengan harapannya sehingga dia tidak mau mencoblos.
- b) Pemilih tidak percaya formalisme sekalipun bersahabat dengan elitisme dan tak percaya formalisme sekaligus elitisme. Biasanya mereka anti terhadap hal-hal formal, seperti partai, pemilihan umum, parlemen, dan pemerintah).
- c)  Pemilih yang tidak mau memilih karena menganggap demokratisasi sebagai arena permainan elite menggunakan arena dan kendaraan formal. Mereka tidak percaya pemilihan umum dan pilihan mereka membawa perubahan terhadap kehidupan mereka.⁵⁷

3) Golput Ideologis

Golput ini cenderung bersifat permanen. Golput ideologis terbagi terdiri dari ideologi sayap kanan maupun sayap kiri.

Masyarakat menganggap golput sebagai perwujudan keyakinan ideologis.

⁵⁶Efriza, , *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, h. 546.

⁵⁷*Ibid*, h. 546.

- a) Pada sayap kiri, mereka menolak berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai konsekuensi dari penolakan atas demokrasi liberal. Masyarakat tidak percaya pada mekanisme demokrasi yang dianggap liberal, untuk itu mereka tidak mau terlibat di dalamnya.
- b) Pada sayap kanan, mereka berasal dari kalangan fundamentalisme agama terutama Islam. Mereka beranggapan demokrasi dan pemilihan umum bertentangan dengan syariat agama.⁵⁸

Pengelompokkan golput ke dalam beberapa kategori juga dikemukakan oleh Indra J. Pilliang dalam Efriza, yaitu:

- 1) Golput ideologi mencakup segala penolakan yang berkaitan dengan ketatanegaraan.
- 2) Golput pragmatif berkaitan dengan kalkulasi rasional, tentang ada tidaknya pengaruh pemilihan umum bagi pemilihnya.
- 3) Golput politis terjadi akibat perubahan sistem dan pilihan politik.⁵⁹

Adanya golput ini memiliki implikasi pada proses-proses demokrasi selanjutnya. Pahmi Sy menjelaskan setidaknya ada lima implikasi dari keberadaan golput, yaitu:

- 1) Lemahnya legitimasi pemenang pemilihan umum sehingga pemerintahan yang dibentuk tidak begitu kuat karena lemahnya dukungan politik.

⁵⁸Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, h. 546.

⁵⁹*Ibid*, h. 544.

- 2) Munculnya sikap apatisme masyarakat golput karena kecewa dengan partai politik.
- 3) Melemahnya optimisme publik terhadap penyelenggara pemilihan umum.
- 4) Menularnya antipati masyarakat terhadap pemilihan umum sehingga pengetahuan dan penggunaan hak pilih berikutnya dalam sistem pemilihan umum semakin tidak mendapat dukungan rakyat.
- 5) Golput merupakan protes terhadap perilaku peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, pengawas pemilihan umum, dan pemenang pemilihan umum sehingga menjadikan mereka untuk berubah perilaku pada pemilihan umum berikutnya.⁶⁰

c. Bentuk-Bentuk Perilaku Golput

Perilaku golput di Indonesia pada umumnya dapat dimanifestasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti yang dikemukakan Efriza berikut ini:

- 1) Orang yang menghadiri TPS sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan sistem politik yang ada. Orang yang menghadiri TPS namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu gambar.

⁶⁰Pahmi, *Politik Pencitraan*, h. 69-70.

- 2) Orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Perilaku ini merupakan refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berkembang.
- 3) Orang yang tidak hadir di TPS dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara. Perilaku golput ini disebabkan alasan administratif dan kelompok golput ini disebut golput pasif.⁶¹

Perilaku golput merupakan salah satu fenomena yang menjadi bagian dalam pemilihan umum sebagai perwujudan asas demokrasi kenegaraan. Memahami perilaku golput memang tidak sebatas pengamatan semata. Perilaku golput juga susah untuk dijelaskan karena alasan yang berbeda-beda dari pemikiran dan latar belakang setiap pemilih. Muhammad Asfar menjelaskannya dalam tulisan “perilaku golput” untuk membantu dalam memahami perilaku bentuk golput, diantaranya:

- 1) Pendukung golput yang mengaku akan mengekspresikan perilakunya dengan cara tidak menghadiri bilik suara, setidaknya ada empat alasan sebagai argumentasi mereka tidak hadir di bilik suara, yaitu:
 - a) Sebagai aksi protes terhadap pemerintah, anggota DPR, dan parpol.

⁶¹Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, .h. 548.

- b) Tidak adanya nilai yang lebih dari proses pemilihan umum yang terjadi.
 - c) Adanya urusan yang lebih penting seperti disinggung di atas mengenai tidakadanya nilai yang lebih dari proses pemilihan umum.
 - d) Dikarenakan malas saja karena tidakadanya nilai lebih dari aktivitas politik melalui kehadiran di bilik suara.⁶²
- 2) Pendukung golput yang beralasan tetap hadir ke tempat pemungutan suara meskipun sudah menetapkan tidak memilih, ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, yaitu:
- a) Untuk menghindari sorotan pengurus kampung, khususnya Ketua RT.
 - b) Untuk menghindari perbincangan para tetangga.
 - c) Sebagai tindak pencegahan atas kecurangan yang mungkin bisa dilakukan panitia pemilihan akibat ketidakhadirannya ke TPS.⁶³
- 3) Pendukung golput yang mengekspresikan perilakunya dengan mencoblos lebih dari satu kandidat atau tanda gambar, memasukkan kartu suara kosong atau mencoblos bagian putih dari kertas suara, pertimbangannya sebagai berikut:
- a) Sebagai aksi protes baik kepada pemerintah, anggota DPR-DPRD, dan parpol.

⁶²Muhammad Asfat, *Pemilihan umum dan Perilaku Memilih* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), h. 11-13..

⁶³*Ibid.*

- b) Agar kertas suara tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- c) Untuk memberikan dorongan dan keberanian pada publik agar berani menunjukkan sikap protes mereka melalui merusak kertas suara.
- d) Agar parpol dan kandidat memperhitungkan keberadaan kelompok golput.⁶⁴

d. Faktor-Faktor Penyebab Golput

Berbagai alasan yang melatar belakangi golput dapat dijelaskan lebih singkat dan jelas di bawah ini:

- 1) Adanya kejenuhan politik, dengan banyak pemilihan umum mulai dari pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, hingga pemilihan kepala desa yang berujung pada kejenuhan politik.
- 2) Tidak adanya harapan yang lebih pasti dan kongkrit dari pemilihan umum tersebut. Pemilihan umum tidak membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosol dan budaya.
- 3) Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada politisi, janji-janji politik yang dilakukan politisi ternyata tidak terbukti.
- 4) Kebutaan politik, kurangnya pengetahuan pemilih terhadap sistem pemilihan umum dan perubahan-perubahan terkait dengan

⁶⁴Muhammad Asfat, *Pemilihan Umum Dan Perilaku*, h. 14. .

pemilihan umum tersebut.

- 5) Sistem politik yang ruwet, dengan tidak sederhananya sistem politik menyebabkan masyarakat pemilih enggan untuk menggunakan hak pilihnya.
- 6) Hilangnya kepercayaan terhadap panitia penyelenggara pemilihan umum seperti KPU dan Panwaslu.
- 7) Adanya indikasi keterlibatan dan keberpihakan pemerintah, PNS, POLRI, dan TNI dalam proses pemilihan umum.⁶⁵

Golput yang identik dengan ketidakhadiran dapat dikaitkan dengan perasaan yang timbul akibat ketidakpercayaan dan ketidaksukaan masyarakat terhadap sistem politik, rezim yang berkuasa, partai politik, dan kandidat. Bentuk ketidaksukaan dan ketidakpercayaan tersebut seperti yang dikemukakan Muhammad Asfar berikut ini⁶⁶:

- 1) Ketidakhadiran diinterpretasikan kepada sistem politik, berbeda dengan kehadiran yang sering diinterpretasikan sebagai bentuk “loyalitas” atau kepercayaan pada sistem politik yang ada.
- 2) Ketidakhadiran pemilih dianggap sebagai reaksi/ekspresi dari ketidaksukaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Asumsi tersebut menyiratkan kondisi bahwa ketidakhadiran pemilih dimaknakan sebagai indikator lemahnya legitimasi rezim yang berkuasa.

⁶⁵Pahmi, *Politik Pencitraan*, h. 66

⁶⁶Muhammad Asfar, *Pemilihan Umum Dan Perilaku*, h. 15..

- 3) Ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap parpol dan kandidat.

Efriza menyimpulkan ada empat faktor yang menjadi penyebab golput, yaitu:

1) Faktor Psikologis

Faktor ini berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian. Perilaku golput berkaitan dengan kepribadian seseorang melihat bahwa kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas politik tidak memengaruhi peristiwa maupun kebijaksanaan politik, menganggap dirinya tidak terlibat urusan politik, dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap hidupnya,⁶⁷

2) Faktor Sistem Politik

Faktor ini berkaitan dengan sistem politik khususnya sistem pemilihan umum secara langsung. Pemilih melakukan protes terhadap sistem politik dan sistem pemilihan umum terutama kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah. Sistem politik yang dibangun rezim berkuasa saat ini dirasakan pemilih tidak mampu membangun demokrasi yang sehat. Sistem


⁶⁷Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. h. 537-544.

pemilihan umum proporsional juga dinilai tidak membawa perubahan politik dan tidak menjamin kedekatan antara wakil dan terwakili.⁶⁸

3) Faktor Kepercayaan Publik

Faktor ini sebagai bentuk perilaku golput sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai suatu ekspresi atas perasaan keterasingan (alienasi). Fenomena faktor kepercayaan politik ini biasanya muncul karena ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk partai dan akhirnya adanya keinginan warga negara untuk melakukan delegitimasi politik terhadap kekuasaan.⁶⁹

4) Faktor Latar belakang Status Sosial Ekonomi



Faktor ini terbagi lagi ke dalam tiga indikator, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone menjelaskan bahwa:

- a) Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, sedangkan yang kurang berpendidikan berpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam proses politik. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat ketidakhadiran selalu

⁶⁸Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. h. 537-544.

⁶⁹*Ibid.*

menunjukkan arah berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilihan umum cukup tinggi.

- b) Tingkat pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga berkaitan langsung dengan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilihan umum dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah.
- c) Tingkat pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilihan umum. Menurut Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone, para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dan sebaliknya.

4. Golput dalam Konsep *Fiqh Siyâsah*

Hak-hak rakyat dalam Negara Islam bisa dibedakan atas Hak-hak Politik dan Hak-hak Umum. Namun dalam pembahasan ini hanya difokuskan pada hak-hak politik rakyat.

a. Hak untuk Memilih

Menurut Ibnu Taimiyah, hal ini didasarkan pada praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW dan Khulafa ar-Rasyidin. Menurut pendapatnya, keempat khalifah itu meraih kekuasaan berdasarkan

pemilihan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berhak memilih kepala Negara melalui *ahlâl-hall wâ al-aqd*.⁷⁰

b. Hak untuk Bermusyawarah

Menurut Ibnu Taimiyah, seorang pemimpin seharusnya tidak hanya meminta pertimbangan dari kalangan ulama, tetapi juga dari semua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan suatu pendapat yang baik.⁷¹ Hanya saja, ada batasan yang melingkari berlakunya konsultasi secara wajar. Lebih lanjut lagi, menurut Ibnu Taimiyah, para pemimpin politik adalah mereka yang bersandar pada prinsip syura dalam menata problema kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, para pemimpin berkewajiban menerima atau mempertimbangkan sebaik-baiknya berbagai rekomendasi yang sejalan dengan syariat.

Jika kepala negara merupakan orang yang terpercaya, maka secara sengaja atau tidak mungkin menetapkan kebijakan yang merugikan rakyat. Apabila kebijakan sudah ditetapkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk menghalau kerugian yang ditimbulkan (karena sudah terlanjur).

Sesungguhnya perwakilan (*al-wikâlat*) kepala negara atas rakyat merupakan perwakilan yang terikat (*al-wikâlat al-muqayyâdat*).

Diantara pengikat-pengikatnya adalah kewajiban kepala negara untuk

⁷⁰Amin Muhammad, *Ijtihad Ibn Taymiyah Dalam Bidang Fiqh Islam* (Jakarta: INISS, 1991), h. 20.

⁷¹*Ibid.*

bermusyawarah dengan rakyat.⁷² Hal ini telah dinashkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁷³

c. Hak untuk Mencalonkan Diri

Seorang warganegara berhak untuk mencalonkan orang lain untuk menduduki jabatan politik. Namun seorang warganegara, pada dasarnya tidak berhak dan tidak etis untuk mencalonkan dirinya sendiri, karena Nabi melarang yang demikian. Namun jika keadannya darurat (seperti di zaman ini dimana banyak orang-orang fasiq dan tidak memiliki keahlian saling berebut jabatan politik) maka pencalonan diri sendiri menjadi boleh asalkan memenuhi syarat-

⁷²Amin Muhammad, *Ijtihad Ibn Taymiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, h. 21.

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: CV Diponegoro, 2000), Cet. 5, h. 245.

syaratnya. Allah telah mencontohkan fenomena ini dalam kasus Yusuf as.⁷⁴

Hal penting yang harus diperhatikan dalam pencalonan diri ialah bahwa yang bersangkutan tidak boleh mencela sesamanya tanpa alasan yang benar (secara *syâr'i*) demi meraih jabatannya. Ia hanya boleh menunjukkan visi, misi, dan pemikiran-pemikirannya, dan tidak lebih dari itu. Politik Islam adalah politik yang penuh etika. Berpolitik, dalam Islam, senantiasa dibingkai oleh kerangka akhlak yang mulia.⁷⁵

d. Hak untuk dipilih dan Memangku Jabatan Umum

Di dalam *Taisîr al-Wushûl* memangku jabatan politik bukanlah hak akan tetapi taklif dan amanah. Nabi melarang umat-Nya untuk memberikan jabatan kepada orang yang memintanya (karena ambisi). Menurut Ibnu Taimiyah hal ini menjadi tanggung jawab para penguasa yang ada. Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang-orang yang terbaik (*al-âs'lah*).⁷⁶ Nabi bersabda, Barangsiapa memegang satu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi kemaslahatan kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.⁷⁷

⁷⁴Al-Mawardi, *Al-Ahkâm As-Sulthānīyah*, M Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), h. 19.

⁷⁵*Ibid*, h. 20.

⁷⁶Amin Muhammad, *Ijtihad Ibn Taymiyah dalam bidang Fiqh islam*, h. 14.

⁷⁷Amin Muhammad, *Ijtihad Ibn Taymiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*. H. 108.

Nabi juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Bukhari:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: "Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah saat Kehancuran (*al-sa'at*)". Rasulullah ditanya, 'Bagaimanakah menyia-nyiakannya?' Rasulullah menjawab, yakni apabila suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya"⁷⁸

Penelitian golongan putih di dalam konsep *fiqh siyâsah* tidak terlepas dari beberapa hak di dalam sistem politik Islam. Terutamanya hak pemilihan umum di dalam pemerintahan yang mengamalkan sistem demokrasi, dalam masa yang sama, punca yang menyebabkan berlaku golongan putih adalah kesalahfahaman sistem demokrasi Islam, seperti berlaku pada kelompok Hizbut Tahrir yang menolak sistem demokrasi yang berlaku politik dunia saat ini.⁷⁹

Kelompok Hizbut Tahrir tidak dikatakan golongan putih, kerana mereka tetap memperdulikan hak-hak perjuangan politik pada Islam, kerana golongan putih dari sudut etimologis adalah sikap yang tidak mengambil peduli di sekitarnya, yang tidak melibatkan hak-haknya di dalam sistem pemilihan umum.⁸⁰

⁷⁸Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Vol 5 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), h. 2382.

⁷⁹Taqiuddin an Nabhan, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah* (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2009), cet. III, h. 13.

⁸⁰Paul H. Mussen dan Anne B. Wiszynsk, *Personality and Political*, Terj. Ahmad Saifullah (London: Human Relation, 1951), cet. 5, h. 78.

Sebagai dasar implementasi hukum Islam di dalam sistem demokrasi tidaklah menjadi hukum *Qâthi'* di dalam *istidlal* hukum, Cuma membawa kepada *dilâlah zhânni*.⁸¹ Kerana ia membawa kepada perkara *khilâfiyyâh*. Dalam literatur *fiqh* dan *ushul al-fiqh* istilah golongan putih/abstain diistilahkan dengan kata "*tawâqquf*" yang secara etimologi bermakna "*talâwwum*", "*talâbbuts*" dan "*tamâkkuts*" yang berarti berdiam diri dan berhenti.⁸² Adapun secara istilah maka sikap *tawâqquf* bermakna sikap yang diambil oleh seorang mujtahid dengan tidak memberikan pendapat dalam sebuah permasalahan *ijtihadiyyâh* yang disebabkan karena tidak nampak baginya sisi yang benar dalam permasalahan tersebut.

Penelitian *fiqh siyâsah* terhadap golongan putih tidak terlepas dari kaitan hak-hak di dalam politik Islam, seperti telah disebut di atas, cuma di sini menjelaskan lagi konsep dan tujuan terhadap hukum-hukum tersebut, yang pertamanya hubungan pemilihan umum dan kaitannya terhadap golongan putih. Adapun pengertian pilihan umum atau pemilihan umum adalah memilih seseorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suara dalam pemilihan umum.⁸³

Penerapan hukum Islam di dalam sistem pemilihan umum menjadi suatu kewajiban untuk mendirikan sebuah negara yang menegakkan daulat

⁸¹ Abd Latif Muda dan Rosmawati Ali, *Perbahasan Usul Ahkam*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2005), cet. I, h. 336.

⁸²"Golongan Putih" *On-line* tersedia di <http://www.islam-indo.org/kajian/fiqh-islam/kontemporer/138-golonganputih.html>. diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

⁸³ Abu Nashr, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilihan umum*, cet. 1 (Yogyakarta: Prisma Media), h. 29.

Islamiyyah, dan golongan putih tidak terlepas di dalam konsep *fiqh siyâsah* tersebut, dengan beberapa contoh kaidah *fiqhiyyâh kuliyyâh* yang menyebut: “tidak sempurna sesuatu kewajiban malainkan dengan suatu perkara tersebut maka (sesuatu perkara tersebut) menjadi wajib”⁸⁴ dan “sesuatu kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan kewajiban yang lain.”⁸⁵

Pengertian kaidah yang pertama adalah, pemilihan umum itu tidak akan berlaku jika golongan putih muncul di sini dan membawa kepada kelemahan umat Islam untuk menegakkan negara yang bersyariatkan Islam. Adapun pengertian kedua adalah apabila hukum pemilihan umum menjadi kewajiban maka golongan putih tidak boleh dibatal hukum tersebut.

Kedua penelitian golongan putih di dalam *fiqh siyâsah* adalah hubungan partai-partai politik. Sebelum dibahas lebih panjang, terlebih dahulu mengenal pengertian partai politik menurut pandangan Islam, sebuah organisasi harus mempunyai empat konsep utama yaitu:

- a. Pemikiran (*fikrah*) yang menentukan tujuan serta yang menjadi asas untuk menyatukan masyarakat dengan partai.
- b. Metode (*thariqah*) yang ditempuh partai untuk meriah tujuan.
- c. Anggota-anggota partai serta sejauh mana keyakinan mereka terhadap pemikiran (*fikrah*) dan metode (*thariqah*) partai.

⁸⁴Taqiyuddin an-Nabhani, *at-Taklil al-Hizbi*, edisi Indonesia: *Terj.* oleh, M. Shiddiqi, *Pembentukan Partai Politik Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002), cet. II, h. 45.

⁸⁵As-Suyuti, *Al-Asyabah Wa an-Nazair Fil Qowaid Fiqhiyyah*, cet. 1 (Kairo: Dar Kutub, 1975), h. 196.

- d. Cara (*kafiyah*) untuk menyatukan masyarakat dengan partai tersebut.⁸⁶

Penelitian golongan putih di dalam *fiqh siyâsah* berkaitan terhadap sistem demokrasi. Jika dilihat di dalam sistem demokrasi, sebagian ulama kontemporer dan intelektual Muslim mengatakan konsep demokrasi mempunyai persamaan dengan sistem *syura* di dalam Islam, antara persamaan adalah sistem demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan mayoritas yang menerapkan metode permusyawaratan dalam pengambilan keputusan.⁸⁷ Adapun sebagian yang lain membedakan dua konsep tersebut dengan berbagai dalil dan kritikan yang dikemukakan. Adapun prinsip demokrasi, terhadap penerapan administrasi negara di dalam penelitian *fiqh siyâsah* adalah:

- a. Prinsip kesadaran kemajmukan.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip cara haruslah sejalan dengan tujuan, prinsip ini mengemukakan dasar bahawa suatu tujuan yang baik haruslah diabsahkan dengan kebaikan cara yang ditempuhi untuk meriahnya.
- d. Prinsip permuafakatan yang jujur.
- e. Prinsip pemenuhan kehidupan ekonomi dan perancangan sosial budaya.
- f. Prinsip kebebasan nurani (*freedom of conscience*).⁸⁸

⁸⁶Taqiyuddin an-Nabhani, *at-Taklil al-Hizbi*, edisi Indonesia: Terj. oleh, M. Shiddiqi, *Pembentukan Partai Politik Islam*, h. 46.

⁸⁷Artani Hasbi, *Musyawah & Demokrasi*, cet.1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 1.

⁸⁸Sukran Kamil, *Islam & Demokrasi*, cet.1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 31.

Dapat disimpulkan bahwa, hubungan golongan putih antar pemilihan umum, partai-partai politik dan sistem demokrasi, tidak boleh memisahkan di dalam penetapan *fiqh siyâsah* bagi tujuan *hifdh al-ummah* sebagai *maqasid al-syâriah* untuk menegakkan sebuah negara Islam.

5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Golput

Seputar hukum Islam terhadap golongan putih dari inti perbahasan di dalam konsep *fiqh siyâsah* di atas, di sini hukum yang dikeluarkan oleh ulama kontemporer dengan beberapa hukum di dalam Islam yang dapat ditinjauakan seperti berikut:

Kategori pertama, mengatakan golongan putih itu hukumnya haram di dalam Islam, antara hubung kait yang membawa kepada hukum tersebut dengan beberapa persoalan :

- a. Mengapa harus ada pemilihan umum?
- b. Apakah umat Islam harus perlu ikut pemilihan umum?
- c. Apakah ikut pemilihan umum itu hak atau kewajiban?
- d. Apakah umat Islam perlu memiliki partai sendiri untuk ikut pemilihan umum?
- e. Apa yang dimaksudkan partai Islam?
- f. Apakah umat Islam harus memilih partai Islam?
- g. Bagaimana seharusnya umat Islam menyinkapi menang atau kalah dalam pemilihan umum?⁸⁹

Dengan penerapan *Fiqh siyâsah* di atas, sudah terjawab, yaitu

⁸⁹"Bagaimana Hukumnya Golongan Putih" *On-line* tersedia di <http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

menyatakan semua ketujuh-tujuh konsep tersebut adalah perlu dan wajib di laksanakan, dan jika dilihat dari sudut pendapat dan fatwa terkini adalah seperti berikut:

Pertama, Syeikh Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan, "Apabila kita melihat kepada peraturan seperti peraturan pemilihan umum atau pemberian suara maka hal tersebut di dalam pandangan Islam adalah suatu persaksian untuk memilih sesuatu yang paling layak."

Kedua, Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Syeikh Abdur Razaq 'Afifi dan Syeikh Abdullah bin Ghodyan, dari Komisi Riset dan Fatwa (Saudi) pernah ditanya tentang pemilihan umum di Aljazair yang di negara tersebut ada partai-partai yang mengajak kepada hukum Islam dan sebagian partai lainnya menolak hukum Islam. Bagaimana hukumnya bagi seorang pemilihan umum?⁹⁰.

Mereka menjawab, "wajib bagi kaum muslimin yang berada di negara-negara yang tidak berhukum dengan syariat Islam untuk memberikan segenap kemampuannya untuk berhukum dengan syariat Islam dan saling bekerja sama bagi sebuah tangan dalam membantu partai yang diketahuinya akan menerapkan syariat Islam..⁹¹

Ketiga, menyikapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam konsideran Sidang Komisi *Masa'il Asasiyah Wathaniyah* yang merupakan salah satu komisi dalam sidang Ijtima Ulama MUI se-Indonesia III,

⁹⁰Syeikh Abdul Aziz bin Abdullan bin Baz, *Fatwa Samahatus* terj, Ahmad Ahsani (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 23.

⁹¹*Ibid.*

Pembahasan keempat langsung mengerucut pada menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Poin keempat ini berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilihan umum Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
- b. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imâmah* (kepemimpinan) dan *imârah* (pengaturan) dalam kehidupan bersama.
- c. *Imâmah* dan *imârah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat
- d. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*shiddiq*), terpercaya (*amânâh*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathânah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam "hukumnya adalah wajib".
- e. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.⁹²

Kesimpulan yang dapat dilihat di sini adalah, sikap golongan putih secara pasif (tanpa kampanye kepada orang lain) termasuk mengabaikan sesuatu yang wajib yang dengan sendirinya dilarang, dalam tinjauan syariat Islam. Sedangkan sikap golongan putih secara aktif (dengan

⁹²Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam konsideran Sidang Komisi Masa'il Asasiyah Wathaniyah se-Indonesia ke-III

kampanye kepada orang lain agar juga golongan putih) termasuk dalam sikap menghalang-halangi manusia dari jalan Allah (*saddun an sabilillah*) yang lebih jelas dilarang lagi.

Kategori kedua, seputar hukum harus sunnah dan wajib terhadap golongan putih, di dalam pendekatan fikih politik, pada dasarnya boleh. Sebab, golongan putih merupakan persoalan mu'amalah *ijtihadiyah* bahkan hukumnya dapat menjadi wajib. Artinya, kalau warga negara itu menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislatif, justru berdosa. Namun golongan putih dapat juga haram hukumnya. Artinya, seorang yang tidak menggunakan hak pilihnya merupakan dosa besar.⁹³

Perubahan dari hukum dasar golongan putih boleh menjadi wajib dan haram karena proses hukum (*illat*) yang memengaruhi hukum dasar itu dan yang menjadi pertimbangan selanjutnya.⁹⁴ Antara golongan putih itu menjadi sunnah, yang di kemukakan oleh Keputusan Majelis Fatwa dan Riset Eropa.⁹⁵

Untuk kesimpulan keseluruhannya hukum di atas, berdasarkan kaidah *fiqh*. perubahan sesuatu hukum itu dengan mengikut perubahan masa, tempat, keadaan, adat dan niat. Impelementasi golongan putih di dalam hukum Islam adalah berpandukan *maqasid syâriah*, di dalam penetapan hukum bagi membawa kepada hukum tersebut adalah haram,

⁹³Miswan Thahani, 8 *Pertanyaan&Jawapan Seputar Fatwa Haram Golongan putih*, (Jakarta: Al-Itishom Anggota Ikapi, 2009), cet. I, h. 10.

⁹⁴<http://www.suaramerdeka.com/harian/0404/03/kha1.htm>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

⁹⁵"Bagaimana Hukumnya Golongan Putih", *On-line* tersedia di <http://www.erasmuslim.com/ustadz-menjawab/bagaimana-hukumnya-golongan-putih.htm>, *Ibid*.

sunnah, wajib dan harus.⁹⁶ Seterusnya, inti dari penarikan atau istinbaht hukum-hukum yang terkait tentang permasalahan golongan putih di dalam konteks *fiqh siyâsah* dapat disimpulkan dalam pembahasan di atas adalah pertama, sifat golongan putih adalah haram dan yang kedua adalah harus dan yang ketiga adalah sunnah.

B. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang upaya menekan golput dalam pemilihan umum yaitu:

Skripsi karya Masriawan yang berjudul "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan umum 2019". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilihan umum 2019, dan untuk mengetahui hambatan Komisi Pemelihan Umum (KPU) Sumenep saat melakukan sosialisasi dalam menekan angka Golput pada Pemilihan umum 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui strategi sosialisasi yang digunakan oleh KPU Sumenep ada 14 basis sosialisasi. Hambatannya secara eksteren, masyarakat tidak mau menerima relawan demokrasi saat sosialisasi dan secara interen, keterlambatan alat peraga dari KPU Sumenep.⁹⁷

Hasil penelitian Aidil Saputra, dan Hamdani M, Syam yang berjudul "Strategi Komunikasi KIP Banda Aceh pada Pilkada 2017 dalam

⁹⁶Moh Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet.I (Jakarta: CV Arhta Rivera, 2008), h. 17.

⁹⁷Masriawan, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan umum 2019" *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2019, h.vii.

Mensosialisasikan Anti Golongan Putih (Golput) Melalui Media Massa". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi komunikasi yang dijalankan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh pada Pilkada serentak 2017 dalam meminimalisir atau menekan suara golput melalui media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat strategi yang disampaikan KIP Banda Aceh dalam Pilkada 2017 terhadap kesadaran masyarakat pemilih, yakni adalah mengenal khalayak, kemudian penyusunan pesan, menetapkan metode, dan penggunaan media. Saran dari penelitian ini adalah KIP Banda Aceh harus lebih gencar dalam mensosialisasikan pilkada mendatang agar sesuai dengan target pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, yaitu 75%.⁹⁸

Berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti berfokus kepada strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif *fiqh siyâsah*.

⁹⁸Aidil Saputra, dan Hamdani M, Syam, "Strategi Komunikasi KIP Banda Aceh pada Pilkada 2017 dalam Mensosialisasikan Anti Golongan Putih (Golput) Melalui Media Massa" (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 3 Nomor 2, 2018), h.29-43.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an al-Karim

B. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.I. Bandung: Citra Aditya Bandung.
- Abdurrahman. 1993. *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islamin*. Mesir: Mathba'ah Dar al Ta'lif.
- Arikunto Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Cet.VII. Jakarta: Bhineka Cipta.
- David FR. 2015. *Manajemen Stratedik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing- Konsep*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. 5. Yogyakarta: CV Diponegoro.
- E. Kristi Poerwandari. 1983. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI.
- Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Jakarta: Alfabeta.
- J. Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Publisher.
- Jimli Asshiddiq. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat jenderal kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Keban Yeremias. 2000. *Good Governance dan capacity Building Sebagai Indikator Utama Penilaian Kinerja*. Bandung: Rosdyakarya.
- Kooten dan J. Salusu. 2008. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik*, Cet,2. Jakarta: Salemba.
- Kuncoro Mudrajad. 2013. *Metode Riset Bagaimana Menulis dan Meneliti*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkuprawira Tb. Sjafri. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Muhammad Abu Zahra. 2001. *Ushul Fiqh*. Semarang: CV Diponegoro.
- Muhammad Asfat. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,
- Pahmi Sy. 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Peter Salim. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Media English Press.
- Prihatmoko J. Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Monsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I.
- Priyatmoko dkk. 1992. *Sikap Politik dan Afiliasi Orang Tua dan Perilaku Memilih Pemuda Kota Surabaya*. Surabaya: Lembaga Penelitian UNAIR.
- Purnomo dan Zulkie Flimansyah. 2007. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Subagyo Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Susiadi AS. 2015. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Stephanie K. Marrus. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press.
- T.M. Hasbi ash-Shiddiqy. 2000. *Pengantar Siyasah Syari'iyah*. Yogyakarta: Madah.

C. Jurnal

- Aidil Saputra dan Dr. Hamdani M, Syam, *Strategi Komunikasi KIP Banda Aceh pada Pilkada 2017 dalam Mensosialisasikan Anti Golongan Putih (Golput) Melalui Media Massa* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol. 3 No. 2 Tahun 2018).
- Masriawan, *Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam Menekan Angka Golput pada Pemilu 2019* (Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Tahun 2019).

Soebagio, *Implikasi Golongan Putih Terhadap Pembangunan Demokratisasi di Indonesia*, dalam Jurnal Makara: Sosial Humaniora Vol. 12 No. 2 Desember 2008.

D. Media Online

Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilu Legislatif 2014 Kota Bandar Lampung (tersedia di: <http://kpubandarlampungkota.go.id/berita/hasil-rekapitulasi-pemilu-legislatif-tahun-2014>, diakses pada 5 September 2019 pukul 00.01 WIB).

<http://bps.go.id/kependudukan/kota-terpadat-di-sumatera>, (diakses pada 5 September 2019, pukul 23.13 WIB.).

<http://m.merdeka.com/politik/tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>, (diakses pada 5 September 2019, pukul 22.50 WIB).

Jazulijuwainima.blogspot.com/2013/07/menuju-pemilu-berkualitas.html. (Diakses pada 5 September 2019 pukul 22.27 WIB).

E. Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

